

Rangkap Jabatan sama dengan BUMN Failure

Apa sebenarnya fungsi komisaris BUMN?



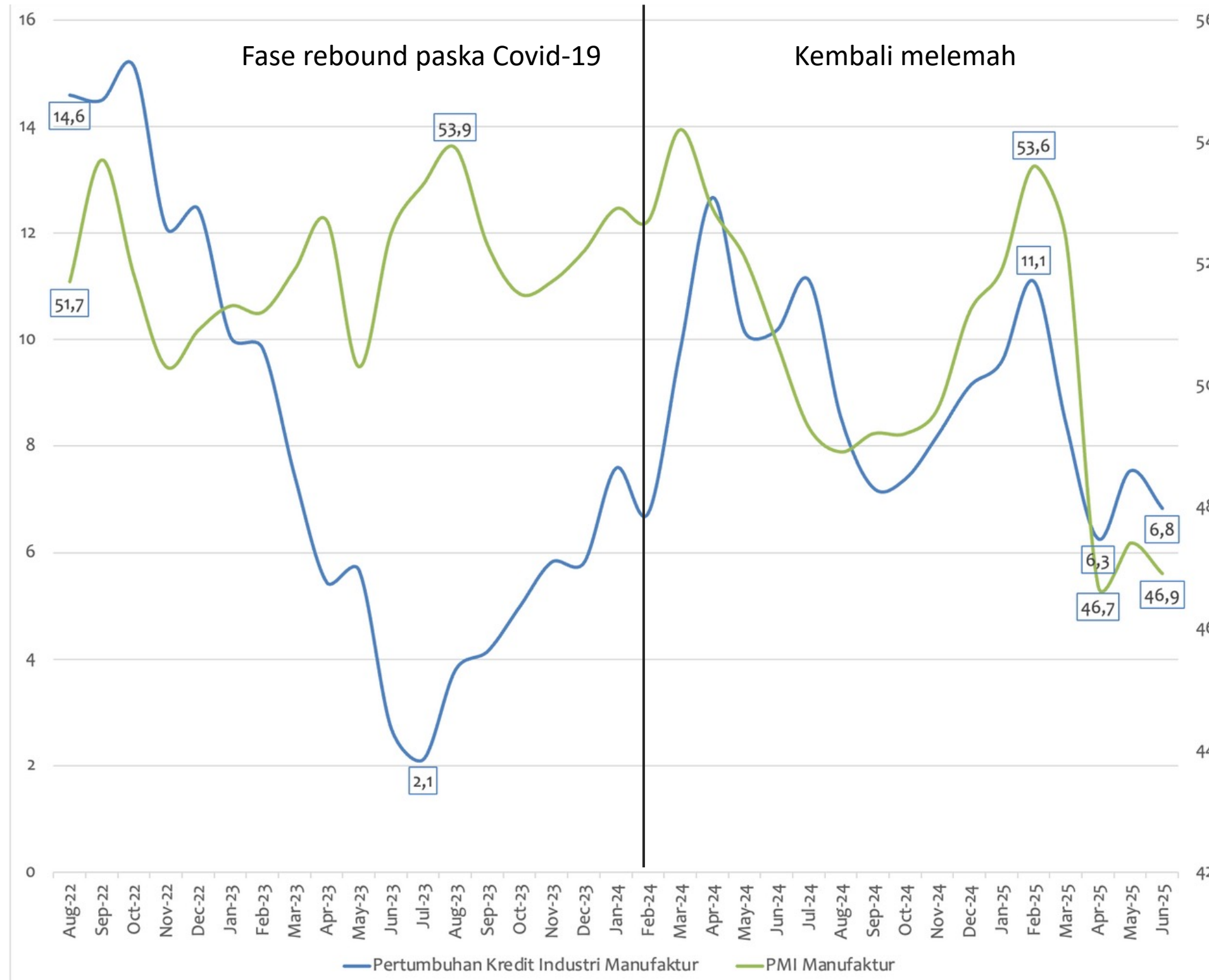
- 1. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Direksi:** Komisaris bertugas mengawasi kebijakan, jalannya pengurusan, serta memberikan arahan kepada direksi. Ini termasuk mengawasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran, laporan keuangan, serta kinerja direksi secara keseluruhan.
- 2. Pemberian Masukan:** Komisaris memberikan input strategis kepada direksi mengenai arah perusahaan.
- 3. Evaluasi Kinerja:** Komisaris memiliki wewenang untuk menilai dan mengevaluasi kinerja direksi, termasuk mengangkat dan memberhentikan anggota direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Menyusun Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance):** Komisaris memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran, diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan.
- 5. Perwakilan Pemegang Saham:** Sebagai perwakilan pemerintah, komisaris memastikan bahwa kebijakan perusahaan sejalan dengan visi dan misi negara sebagai pemilik BUMN.

Matinya meritokrasi BUMN



1. Calon Karyawan BUMN menghadapi proses seleksi yang ketat (**1,4 juta pelamar berebut 2.000 posisi di 2025**)
2. Sementara jabatan komisaris bersifat penunjukkan politik (political appointee)
3. Efek dari matinya meritokrasi: demoralisasi dan turunnya produktivitas
4. Pembagian struktur remunerasi yang tidak berbasis pada kinerja

BUMN Pemicu Deindustrialisasi Prematur



Paska pandemi terjadi penurunan pertumbuhan kredit industri pengolahan sejalan dengan kontraksi PMI Manufaktur.

Kinerja BUMN makin jauh dari upaya mereverse deindustrialisasi premature, karena inkompetensi dan **political appointee direksi-komisaris**

Sumber: Bank Indonesia, S&P Global, 2025 (Diolah Celios)



CELIOS
CENTER OF ECONOMIC
AND LAW STUDIES

Danantara belum mampu menarik inflow investasi dari luar negeri (banyak kekhawatiran Danantara terkait inkompetensi dan konflik kepentingan)

Rupiah and LQ45 shows weakening trend
















Source: CEIC, 2025

List Proyek Pemerintah yang ditawarkan ke Danantara (per Juli 2025)

Ada Proyek yang tidak laku dan tidak berkelanjutan diserahkan ke Danantara

Proyek Strategis	Lokasi	Rp Triliun	Tenaga Kerja
Industri DME (Batu Bara) 	Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin	164	34.800
Kilang Minyak 	Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak	160	44.000
Tangki Penyimpanan Minyak 	Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak	72	6.960
Industri Peleburan Aluminium (Bauksit) 	Mempawah, Kalimantan Barat	60	14.700
Industri Slab Baja Tahan Karat (Nikel) 	Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah	38,4	12.000
Modul Surya Terintegrasi (Bauksit & Silika) 	KI Batang Jawa Tengah	24	19.500
Batang, Kawat & Tabung Tembaga (Katoda Tembaga) 	Gresik, Jawa Timur	19,2	9.700

-  Wajib dihindari
-  Perlu standar ketat
-  Perlu didukung

Industri Besi dan Baja (Pasir Besi) 	Kabupaten Sarmi, Papua	19	18.000
Industri Alumina Grade Kimia (Bauksit) 	Kendawangan, Kalimantan Barat	17,3	7.100
Industri Tanaman Chlor Alkali (Garam) 	Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumsel, Riau, Banten, NTT	16	33.000
Industri Bahan Bakar Bio-jet (Minyak Goreng Bekas) 	KBN Marunda, KI Cikarang, KI Karawang	16	10.152
Industri Manganese Sulfate (Mangan) 	Kupang, NTT	3,1	5.224
Industri Oleood (Minyak Sawit) 	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK)	3	4.800
Industri Nata de Coco (Kelapa) 	KI Tenayan, Riau	2,3	22.100
Industri Oleoresin (Pala) 	Kabupaten Fakfak, Papua Barat	1,8	1.850
Industri Aspal (Aspal Buton) 	Buton, Sulawesi Tenggara	1,5	3.450
Industri Fillet Ikan Nila (Ikan Nila) 	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur	1	27.600
Industri Karagenan (Rumput Laut) 	Kupang, NTT	0,2	1.700

Uang Nasabah di Bank Himbara Bagaimana Nasibnya Kalau ada Proyek Gagal?

Absennya Regulasi Risiko Sistemik dalam Pengelolaan Aset Bank BUMN oleh Danantara

Danantara mengelola aset bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, yang memiliki skala aset besar dan peran strategis dalam perekonomian nasional. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur dampak potensial dari pengelolaan aset ini terhadap stabilitas sektor keuangan, terutama dalam konteks risiko gagal bayar yang dapat muncul jika Danantara tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Risiko ini berpotensi membawa konsekuensi sistemik yang luas, mengingat bank-bank BUMN termasuk kategori bank sistemik yang terhubung erat dengan berbagai sektor keuangan. Jika terjadi gangguan likuiditas atau solvabilitas di Danantara, dampaknya dapat merembet ke bank BUMN dan mengancam stabilitas keuangan nasional.



Salah Benar Tidak Bisa Dipidana? Polemik Business Judgement

Danantara Menghapus Batas Pertanggungjawaban Pidana dan Memperbesar Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan

Table 1.3 Imunitas Hukum dan Potensi Masalah

Kategori	Syarat Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Hukum
Dasar Hukum	Pasal 3Y UU BUMN
Pihak yang Berlaku	Menteri, organ, dan pegawai Badan
Syarat Bebas dari Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none">- Bukan karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan.- Pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi serta prinsip tata kelola yang baik.- Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan investasi.- Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.



61,3%

Berpendapat
Danantara Berisiko
Menambah Beban
Utang BUMN

47,6%

Akuntabilitas dan
transparansi
tantangan terbesar
Danantara

56,8%

Responden tidak
setuju modal investasi
Danantara diambil dari
APBN

59,7%

Menjawab Risiko
Penyalahgunaan
Kekuasaan oleh Elit
dalam Danantara
sangat besar

80,7%

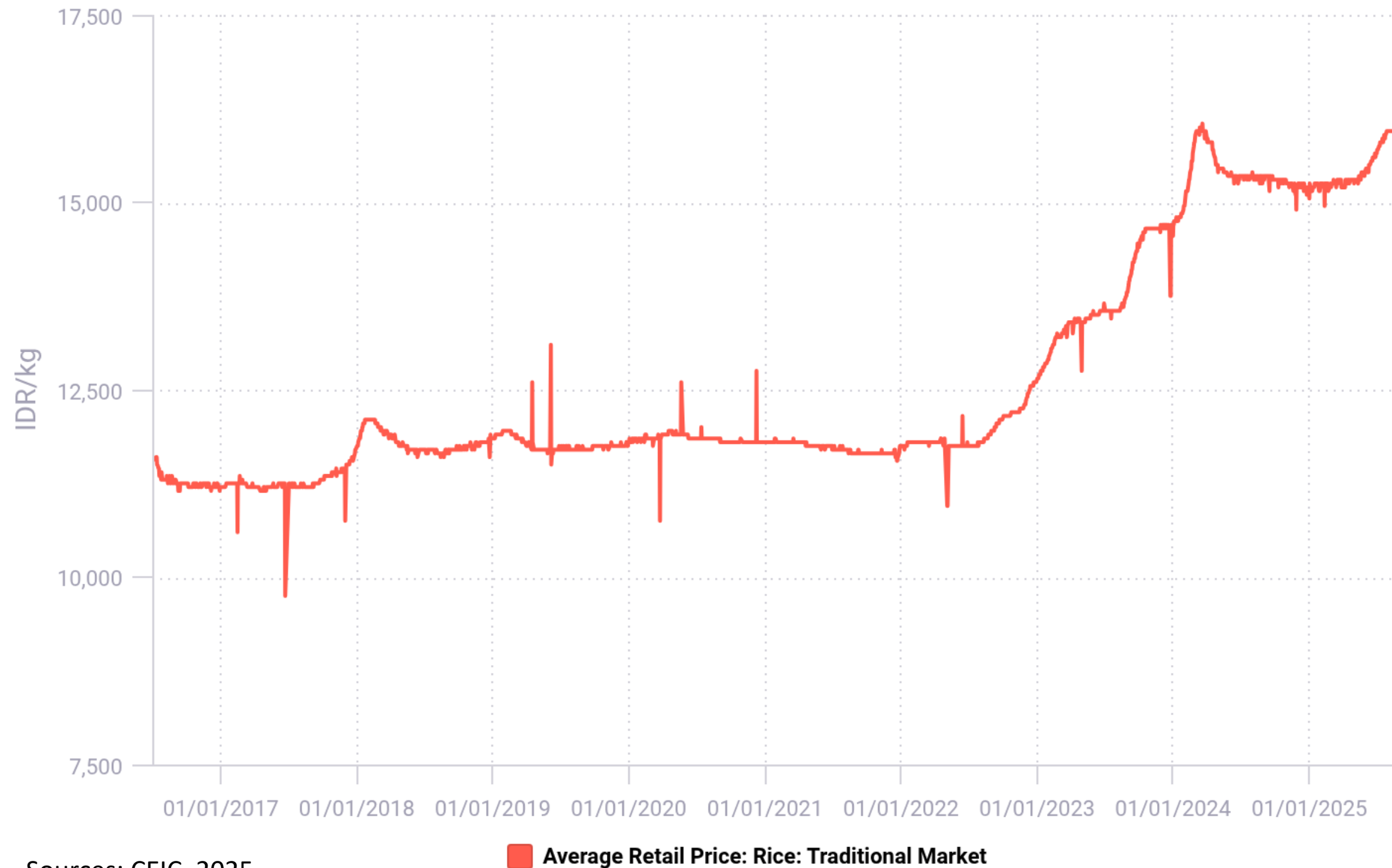
Khawatir risiko
korupsi
pengelolaan
Danantara

Estimasi dampak rangkap jabatan

- 1.35 Menteri dan Wakil Menteri rangkap jabatan sebagai komisaris. Diasumsikan jika setiap komisaris memiliki akses terhadap proyek yang membuat pembengkakan biaya 3-7%, maka kerugian bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah per tahun
2. Saat ini, gaji komisaris bisa mencapai setidaknya Rp1 miliar per bulan/orang x 35 orang. **Uang BUMN hilang Rp 2,1 triliun selama 5 tahun.**
3. Estimasi ini belum termasuk staf khusus menteri dan staf khusus presiden yang juga rangkap jabatan sebagai Komisaris.
4. Kerugian ini berimplikasi signifikan pada pemborosan BUMN **(depleted resources).**

BUMN Pangan dibalik klaim stok beras tertinggi sepanjang sejarah

**Fakta- Harga beras naik, dimana stok beras yang diklaim itu?
Harga BUMN pangan- BULOG dijadikan pencitraan politik**



Sources: CEIC, 2025

Memperkenalkan Danantaramonitor.org : Inisiasi Transparansi Danantara dari Masy Sipil



Danantara Monitor

Track the Trillions. Expose the Silence.

A US\$1 trillion experiment without full transparency is a recipe for disaster. Demand public oversight, sustainable investment roadmap and independent accountability—now.

List proyek Danantara lebih transparan dari website BPI Danantara

The Danantara Files			
A closer look at the state-owned giants placed under Danantara’s control—who controls what, how much is at stake, and what the public still doesn’t know.			
Strategic Projects	Location	IDR Trillion	Employment
DME Industry (Coal)	Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin	164	34,800
Oil Refinery	Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak	160	44,000
Oil Storage Tanks	Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak	72	6,960
Aluminum Smelter Industry (Bauxite)	Mempawah, Kalimantan Barat	60	14,700
Stainless Steel Slab Industry (Nickel)	Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah	38.4	12,000
Integrated Solar Module (Bauxite & Silica)	KI Batang Jawa Tengah	24	19,500
Copper Rod, Wire & Tube (Copper Cathode)	Gresik, Jawa Timur	19.2	9,700
Iron and Steel Industry (Iron Sand)	Kabupaten Sarmi, Papua	19	18,000
Chemical Grade Alumina Industry (Bauxite)	Kendawangan, Kalimantan Barat	17.3	7,100
Gas Alkali Plant Industry (Salt)	Asah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Gunung, Riau, NTT	16	22,000

[VIEW FULL REPORT](#)

Translate »

Surat CELIOS kepada Majelis Ulama Indonesia



CELIOS AJUKAN FATWA KE MUI

soal penghasilan rangkap Menteri/Wakil Menteri-Komisaris BUMN

Larangan rangkap jabatan tak boleh diabaikan



Terima Kunjungan Celios, Komisi Fatwa Tabayun Soal Permohonan Hukum Gaji Menteri-Wamen Rangkap Jabatan

Sumber: <https://mui.or.id/baca/berita/terima-kunjungan-celios-komisi-fatwa-tabayun-soal-permohonan-hukum-gaji-menteri-wamen-rangkap-jabatan>

Terimakasih

